



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

RENCANA KERJA TAHUN 2021



**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
JL. MT. HARYONO TELP. 0541 - 734972, FAX 0541-731208
SAMARINDA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 050.14 / K. / Penda-V / 2021

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur memuat arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 1 (satu) Tahun;
 - b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa sesuai dengan pasal 19 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
 2. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana Diktum kesatu merupakan landasan bagi unit kerja dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
 3. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dijadikan bahan acuan dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 4. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal Desember 2020

KEPALA

Dra. Hj. Ismiati, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650914 199012 2 001

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. Budi Hartono	Sekretaris	
2	Hj. Elfina	Kabid PEP	
3	Hj. Ida Nuraini	Kasubbag. Penyusunan Program	
4	Hj. Lia Fitri Muslim	Kasubbid. Kajian Hukum & Per UU	



KATA PENGANTAR



Rencana kerja tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2023.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja yang memuat kebijakan makro ekonomi dalam program dan kegiatan serta Sub Kegiatan diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengukur kinerja serta alat untuk mendorong terwujudnya *good governance (Pemerintahan yang baik)*, terhadap pelaksanaan tugas pokok, kewenangan dan pengelolaan sumber daya atas pelaksanaan kebijakan serta program dan kegiatan.

Dalam perspektif yang lebih luas rencana kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dan implementasinya perlu mendapat tanggapan, usulan, saran dan pendapat dari masyarakat, sehingga masukan sangat berharga tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan perbaikan kinerja maupun dasar kerangka regulasi pada tahun anggaran mendatang.

Demikian rencana kerja ini disusun dengan harapan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan.

Samarinda, 12 Juli 2020

KEPALA BADAN,

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Hj. Ida Nuraini, SH, M.Si	Kasubbag Sungram	
2.	H. Budi Hartono, SE, M.Si	Sekretaris	

Dra. Hj. ISMIATI, M.Si
NIP. 19650914 199012 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2020	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	29
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	32
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	55
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	56
3.1. Telaahan Kebijakan Nasional	56
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD	57
3.3. Program dan Kegiatan	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	77
BAB V PENUTUP	109
Lampiran – Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membentuk sistem baru bagi Pemerintahan di daerah yang membuka peluang, tantangan dan kendala terutama pada daerah untuk lebih leluasa mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut diperlukan pembiayaan yang memadai, dimana daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada Undang-Undang.

Untuk melaksanakan pungutan sebagaimana tersebut diatas pada Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia telah dibentuk Instansi/Lembaga sebagai leading sektor untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang Pajak Daerah, Retribusi dan lain-lain. Untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan



Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan hal tersebut.

Fenomena pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah disebabkan antara lain oleh faktor-faktor sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, batasan hukum, regulasi serta kondisi geografis.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi yang baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah diantaranya membangun networking dengan wajib pajak, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sebagai suatu wujud nyata Otonomi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini merupakan sumber pendapatan yang dominan, dan masih dapat dikembangkan peningkatan penerimaannya dari berbagai komponen yang mendukung.

Untuk menindaklanjuti peluang - peluang dimaksud perlu ditunjang dengan soliditas aparatur pelaksana operasional pendapatan, pelayanan yang mudah nyaman dan aman, pengelolaan seluruh potensi pendapatan daerah yang makin rasional dan terukur dengan terus memperkuat spirit yaitu komitmen, jujur, profesional serta penuh inovasi dan bertanggungjawab.



1.2. LANDASAN HUKUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain – lain, Dana Perimbangan, Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan yang berada dibawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kewenangan desentralisasi adalah dalam bentuk pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan tugas dekonsentrasi dalam bidang pengurusan Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 bagian kedua paragraf 1 pasal 4 untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan;



- c. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
- d. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan bukan pajak daerah;
- e. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dasar hukum pelaksanaan program dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah pada Bidang pendapatan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

- 1.1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 1.2. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur jo Nomor 08 Tahun 2014.
- 1.3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
- 1.4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.



- 1.5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 1.6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan.
- 1.7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- 1.8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2012 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur.
- 1.9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok.
- 1.10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- 1.11. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 973/05/Penda-VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
- 1.12. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 973/06/Penda-VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 1.13. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 973/15/Penda-VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis



Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- 1.14. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 973/16/Penda-VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan.
- 1.15. Surat Keputusan Bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim Nomor : 973/461/Penda-II/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis Mekanisme/prosedur Pungutan PKB/BBNKB Alat-Alat Berat/Besar di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Retribusi Daerah

- 2.1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 130, Tambahan Lembar Negara RI No. 5049).
- 2.2. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusda Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur.
- 2.3. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusda Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- 2.4. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- 2.5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur.



- 2.6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur.
- 2.7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusda Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas Agro Kaltim Utama.
- 2.8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahu 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusda Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur.
- 2.9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2012 No. 1).
- 2.10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2012 No. 2).
- 2.11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2012 No. 3).
- 2.12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT. Asuransi bangun ASKRIDA dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 95 Tahun 2011.
- 2.13. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga.



- 2.14. Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- 2.15. Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 2.16. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan tertentu.
- 2.17. Perjanjian dasar Kerjasama Pembangunan Komp. Lembuswana Samarinda serta beberapa fasilitas penunjang lainnya (BOT 30 Tahun dari tanggal 26 Juli 1996 s/d Juli 2026) tentang Parkir Mall Lembuswana.
- 2.18. Addendum Perjanjian Dasar Kerjasama Pembangunan Komp. Lembuswana Samarinda tanggal 23 Januari 2003 tentang denda keterlambatan pembangunan kios makanan souvenir dan tempat bermain.

3. Dana Perimbangan

- 3.1. Undang –Undang R.I Nomor 17 Tahun 2000 Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pajak Penghasilan.
- 3.2. Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 3.3. Undang-Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah



- 3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 Tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan.
- 3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- 3.6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1454.K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
- 3.7. Surat edaran Menteri Keuangan RI Dirjen Anggaran Nomor SE-49/A/2002 perihal Perubahan Tarif PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah bagi Pejabat Negara, PNS dan Para pensiunan atas Penghasilan atau Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Daerah.
- 3.8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 3.9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- 3.10. Surat Edaran Gubernur Kaltim Nomor 973/2693/TUAA/Penda-IV/2004 perihal Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21.
- 3.11. Keputusan Bersama Gubernur Kaltim dan Dirjen Pajak Nomor Kep-162/Pj/2002 tentang Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.



1.3.Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan rencana Kerja ini telah mempertimbangkan faktor – faktor antara lain :

- a. Kemampuan fiskal Daerah.
- b. Kebutuhan Daerah.
- c. Cakupan tugas yang meliputi Sasaran Tugas yang harus diwujudkan.
- d. Jenis dan Banyaknya Tugas.
- e. Luas Wilayah Kerja dan Kondisi Geografis.
- f. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.
- g. Potensi Daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani.
- h. Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Rencana Kerja ini antara lain adalah :

1. Sebagai Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023.
2. Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi serta Peranan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain – lain.



Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur kedalam program dan kegiatan yang rinci, terarah, dan terukur.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Menciptakan Iklim Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa guna mewujudkan Good Governance dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi kepada kepuasan publik.



1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Rencana Kerja ini diawali dari:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu.

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2. 3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2. 5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Lampiran – Lampiran



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Didalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (2019 – 2023) telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diaplikasi kedalam Rencana Kerja Bapenda Prov. Kaltim tahun 2020 guna mendukung program kegiatan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 adalah : ***Peningkatan Pendapatan sebesar 3,84 Persen***

Evaluasi dan analisis capaian kinerja adalah hasil-hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi pelaksanaannya, dimana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahuinya pencapaian target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang telah dicapai, serta kemajuan – kemajuan yang dialami dan



kendala yang ditemukan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan.

Secara umum pencapaian penetapan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Gubernur Kalimantan Timur, dapat dijelaskan melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020 TRIWULAN II**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi TW II Murni 2020	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pendanaan Pembangunan Daerah setiap tahunnya	3,84 %	5.422.256.620.553,18	1,76 %

Persentase peningkatan target APBD tahun 2020 sebesar 3.84 % dengan perhitungan **Target APBD TA 2020 – Target APBD TA 2019 / Target APBD TA 2019 X 100 %**. Di dalam pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II sudah mencapai 45,87 % / Rp. 5.422.256.620.553,18 dari target murni sebesar Rp. 11.821.170.903.876 kalau dihitung secara perbandingan maka hasil kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bisa dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 X & : \text{Kinerja} \quad \Rightarrow \quad 3.84 : 100 \% \\
 & \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad X : 45,87 \%
 \end{aligned}$$

3.84	↖ ↗	100 %
X	↘ ↙	45,87 %
X = 3.84 x 45,87 : 100		
X = 1,76 %		



Pencapaian Sasaran Strategis tersebut tidak lepas dari pencapaian sasaran Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rumusan sesuai dengan Pergub. No. 77 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yaitu : Direncanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan dengan menggunakan Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah, Dilaksanakan oleh Bidang Pajak Daerah dan Bidang Bukan Pajak Daerah serta dibantu oleh UPTD se Kaltim dengan menggunakan Program Koordinasi Pajak Daerah dan Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak serta Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain – Lain, dikendalikan dan dievaluasi oleh Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dengan menggunakan Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan. Pencapaian Program dan Kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Program dan Kegiatan yang berkenaan dalam pencapaian Sasaran Strategis

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Indikator Kinerja dan pendanaan TA 2020			Realisasi Indikator Kinerja dan pendanaan TA 2020		
			Kinerja	Satuan	Rupiah	Kinerja	Satuan	Rupiah
4.04.01	Badan Pendapatan Daerah				17.817.089.500			-
4.04.01.01	Badan Pendapatan Daerah Provinsi				14.659.079.500			-
4.04.01.01.31	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	100	%	5.136.010.500		%	
4.04.01.01.31.01	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	Jumlah realisasi tunggakan pajak	60.000.000.000	Rupiah	700.665.250		Rupiah	
4.04.01.01.31.02	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Jumlah realisasi penerimaan PKB	824.000.000.000	Rupiah	2.874.175.500		Rupiah	
		Jumlah realisasi penerimaan BBNKB	856.000.000.000					
4.04.01.01.31.03	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah realisasi penerimaan PBBKB	2.996.000.000.000	Rupiah	1.561.169.750		Rupiah	
		Jumlah realisasi penerimaan Pajak AP	12.000.000.000					
		Jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok	160.500.000.000					
4.04.01.01.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapainya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	100	%	2.329.057.500		%	
4.04.01.01.32.01	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	33.620.185.000	Rupiah	984.670.000		Rupiah	
4.04.01.01.32.02	Koordinasi Penerimaan lain-lain	Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	227.111.724.398	Rupiah	454.087.500		Rupiah	
		Jumlah realisasi lain - lain pendapatan asli daerah yang sah	785.923.810.602					
		Jumlah realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah	12.420.000.000					
4.04.01.01.32.03	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak	3.007.724.000.000	Rupiah	890.300.000		Rupiah	



		Jumlah realisasi DAU	815.693.641.000					
4.04.01.01.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	18	Dokumen	1.392.407.000		Dokumen	
4.04.01.01.33.02	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pendapatan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap mekanisme pendapatan daerah serta administrasi keuangan	3	Jenis Pendapatan	669.050.000		Jenis Pendapatan	
4.04.01.01.33.03	Kajian Hukum dan Perundang-undangan	Jumlah regulasi yang berkaitan dengan pendapatan	5	Peraturan	723.357.000		Peraturan	
4.04.01.01.35	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek/Sumber Pendapatan Baru	2	Obyek	5.801.604.500		Obyek	
4.04.01.01.35.01	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	Jumlah realisasi sumber Pendapatan Baru	4	SPB	1.899.380.000		SPB	
4.04.01.01.35.02	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Jumlah Kajian analisis pengembangan pelayanan pendapatan	2	Kajian	3.902.224.500		Kajian	
4.04.01.02	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda				141.400.000			-
4.04.01.02.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Samarinda	100	%	141.400.000		%	
4.04.01.02.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	5.000.000.000	Rupiah	41.400.000		Rupiah	
4.04.01.02.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	420.000.000.000	Rupiah	100.000.000		Rupiah	
4.04.01.03	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara				348.760.000			-



4.04.01.03.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kukar	100	%	348.760.000		%	
4.04.01.03.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Kartanegara	2.000.000.000	Rupiah	200.740.000		Rupiah	
4.04.01.03.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Kartanegara	221.000.000.000	Rupiah	148.020.000		Rupiah	
4.04.01.04	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur				668.750.000			-
4.04.01.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kutim	100	%	668.750.000		%	
4.04.01.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Timur	4.000.000.000	Rupiah	152.750.000		Rupiah	
4.04.01.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Timur	107.000.000.000	Rupiah	516.000.000		Rupiah	
4.04.01.05	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat				259.600.000			-
4.04.01.05.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kubar	100	%	259.600.000		%	
4.04.01.05.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Barat	750.000.000	Rupiah	77.100.000		Rupiah	
4.04.01.05.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Barat	47.500.000.000	Rupiah	182.500.000		Rupiah	
4.04.01.06	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan				368.950.000			-



4.04.01.06.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Balikpapan	100	%	368.950.000		%	
4.04.01.06.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan	5.000.000.000	Rupiah	84.600.000		Rupiah	
4.04.01.06.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan	450.000.000.000	Rupiah	284.350.000		Rupiah	
4.04.01.07	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang				292.900.000			-
4.04.01.07.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Bontang	100	%	292.900.000		%	
4.04.01.07.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	4.000.000.000	Rupiah	107.300.000		Rupiah	
4.04.01.07.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	7.000.000.000	Rupiah	185.600.000		Rupiah	
4.04.01.08	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara				345.000.000			-
4.04.01.08.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Penajam Paser Utara	100	%	345.000.000		%	
4.04.01.08.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	500.000.000	Rupiah	98.000.000		Rupiah	
4.04.01.08.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	40.000.000.000	Rupiah	247.000.000		Rupiah	
4.04.01.09	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser				427.900.000			-



4.04.01.09.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Paser	100	%	427.900.000		%	
4.04.01.09.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser	1.000.000.000	Rupiah	104.500.000		Rupiah	
4.04.01.09.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser	70.000.000.000	Rupiah	323.400.000		Rupiah	
4.04.01.10	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau				304.750.000			-
4.04.01.10.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Berau	100	%	304.750.000		%	
4.04.01.10.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	1.000.000.000,00	Rupiah	61.000.000		Rupiah	
4.04.01.10.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	68.000.000.000,00	Rupiah	243.750.000		Rupiah	



Selain Program dan Kegiatan yang berkenaan langsung terhadap pencapaian Sasaran Strategis ada juga Program dan Kegiatan untuk mendukung operasional yang bersifat rutin yaitu :

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Indikator Kinerja dan pendanaan TA 2020			Realisasi Indikator Kinerja dan pendanaan TA 2020		
			Kinerja	Satuan	Rupiah	Kinerja	Satuan	Rupiah
4.04.01	Badan Pendapatan Daerah				59.209.709.460			-
4.04.01.01	Badan Pendapatan Daerah Provinsi				34.654.789.540			-
4.04.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87	%	5.875.665.740		%	
4.04.01.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	5.875.665.740		Bulan	
4.04.01.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	Unit	24.916.338.800		Unit	
4.04.01.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	8	Jenis	23.373.721.000		Jenis	
4.04.01.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11	Jenis	1.542.617.800		Jenis	
4.04.01.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	63	%	3.084.514.000		%	
4.04.01.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	45	Kegiatan	2.744.764.000		Kegiatan	
4.04.01.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15	PNS	339.750.000		PNS	
		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	325	Stel			Stel	



4.04.01.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68	Nilai AKIP	778.271.000		Nilai AKIP	
4.04.01.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4	Dokumen	152.021.000		Dokumen	
4.04.01.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen / Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5	Dokumen / Laporan	626.250.000		Dokumen / Laporan	
4.04.01.02	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda				4.200.484.000			-
4.04.01.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87	%	3.261.654.000		%	
4.04.01.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	3.261.654.000		Bulan	
4.04.01.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	878.330.000		Unit	
4.04.01.02.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	13	Jenis	130.300.000		Jenis	
4.04.01.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	748.030.000		Jenis	
4.04.01.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45	%	60.500.000		%	
4.04.01.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5	Kegiatan	60.500.000		Kegiatan	
4.04.01.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	10	PNS	-		PNS	



	Aparatur							
		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	131	Stel			Stel	
4.04.01.03	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara				3.832.678.240			-
4.04.01.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87	%	2.941.964.240		%	
4.04.01.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	2.941.964.240		Bulan	
4.04.01.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu		Unit	691.234.000		Unit	
4.04.01.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	21	Jenis	-		Jenis	
4.04.01.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8	Jenis	691.234.000		Jenis	
4.04.01.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45	%	199.480.000		%	
4.04.01.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan	199.480.000		Kegiatan	
4.04.01.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-			
		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	119	Stel			Stel	
4.04.01.04	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur				2.158.234.880			-
4.04.01.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87	%	1.408.662.800		%	
4.04.01.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi	12	Bulan	1.408.662.800		Bulan	



		perkantoran						
4.04.01.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	586.322.080		Unit	
4.04.01.04.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	12	Jenis	87.754.000		Jenis	
4.04.01.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8	Jenis	498.568.080		Jenis	
4.04.01.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45	%	163.250.000		%	
4.04.01.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5	Kegiatan	143.250.000		Kegiatan	
4.04.01.04.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	4	PNS	20.000.000		PNS	
4.04.01.05	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat				2.131.860.640			-
4.04.01.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87	%	1.672.860.640		%	
4.04.01.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.672.860.640		Bulan	
4.04.01.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	267.500.000		Unit	
4.04.01.05.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	16.200.000		Jenis	
4.04.01.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	251.300.000		Jenis	



4.04.01.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45	%	191.500.000		%	
4.04.01.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5	Kegiatan	188.500.000		Kegiatan	
4.04.01.05.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.000.000			
		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	56	Stel			Stel	
4.04.01.06	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan				3.692.402.720			-
4.04.01.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87	%	2.723.786.620		%	
4.04.01.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	2.723.786.620		Bulan	
4.04.01.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	734.116.100		Unit	
4.04.01.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	13	Jenis	158.716.000		Jenis	
4.04.01.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11	Jenis	575.400.100		Jenis	
4.04.01.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45	%	234.500.000		%	
4.04.01.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan	197.500.000		Kegiatan	
4.04.01.06.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	15	PNS	37.000.000		PNS	



		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	93	Stel			Stel	
4.04.01.07	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang				1.737.921.440			-
4.04.01.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87	%	1.142.791.440		%	
4.04.01.07.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.142.791.440		Bulan	
4.04.01.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	382.530.000		Unit	
4.04.01.07.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	78.510.000		Jenis	
4.04.01.07.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	304.020.000		Jenis	
4.04.01.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45	%	212.600.000		%	
4.04.01.07.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan	192.600.000		Kegiatan	
4.04.01.07.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	6	PNS	20.000.000		PNS	
		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	44	Stel			Stel	
4.04.01.08	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara				1.981.888.160			-
4.04.01.08.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87	%	1.193.158.160		%	
4.04.01.08.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.193.158.160		Bulan	



4.04.01.08.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	546.730.000		Unit	
4.04.01.08.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	47.530.000		Jenis	
4.04.01.08.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	499.200.000		Jenis	
4.04.01.08.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45	%	242.000.000		%	
4.04.01.08.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	6	Kegiatan	242.000.000		Kegiatan	
4.04.01.08.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-			
		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	36	Stel			Stel	
4.04.01.09	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser				2.593.571.840			-
4.04.01.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87	%	1.285.401.840		%	
4.04.01.09.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.285.401.840		Bulan	
4.04.01.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	904.270.000		Unit	
4.04.01.09.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	412.000.000		Jenis	
4.04.01.09.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	492.270.000		Jenis	



4.04.01.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45	%	403.900.000		%	
4.04.01.09.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	12	Kegiatan	403.900.000		Kegiatan	
4.04.01.09.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-			
		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	39	Stel			Stel	
4.04.01.10	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau				2.225.878.000			-
4.04.01.10.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	87	%	1.197.368.000		%	
4.04.01.10.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.197.368.000		Bulan	
4.04.01.10.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	754.260.000		Unit	
4.04.01.10.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	319.002.000		Jenis	
4.04.01.10.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	435.258.000		Jenis	
4.04.01.10.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	45	%	274.250.000		%	
4.04.01.10.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	13	Kegiatan	264.250.000		Kegiatan	
4.04.01.10.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	4	PNS	10.000.000		PNS	



Secara garis besar sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 - 2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sebagian mulai dilaksanakan capaian kerjanya, dan diharapkan pada akhir tahun 2020 semua sasaran, program dan kegiatan dari target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan SKPD pada Bapenda Provinsi Kalimantan Timur telah mempunyai indikator kinerja, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda, ditentukan dalam Standar Pelayanan Prima, dengan mengacu pada Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Keputusan Menpan No. 63/Kep/M.PAN/VII/2003.

Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki cakupan wilayah operasional seluas 129.066,64 km² dengan 10 Kabupaten dan Kota, 103 Kecamatan, serta 1.032 Desa dan Kelurahan dengan jumlah penduduk 3.501.232 Jiwa. Secara keseluruhan jumlah Unit Pelaksana Teknis berjumlah 9 UPTB Kantor Bersama Samsat. Sedangkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang dimiliki berjumlah 514 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 264 orang, Pegawai Honorer dan atau Tenaga Outsourcing sejumlah 250 orang.

Dalam rangka upaya meningkatkan Pelayanan Publik pada pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta upaya meningkatkan penerimaan



Pendapatan Asli Daerah maka dilaksanakan layanan unggulan pada 9 Kantor Bersama (KB) SAMSAT di seluruh Kalimantan Timur dan pengembangannya antara lain:

a) Samsat Pembantu :

- Samarinda, berlokasi di : Samarinda Seberang, Samarinda Utara, Jl. Kesuma Bangsa, Sambutan, Loa Bakung dan Perum Alaya, SCP.
- Balikpapan, berlokasi di :Batakan, Muara Rapak dan Kebun Sayur
- Kutai Kartanegara, berlokasi di : Kota Bangun, Samboja, Muara Badak, Anggana, Jl. Cut Nyak Dien, Muara Muntai, Teluk Dalam dan Loa Duri.
- Kutai Barat, berlokasi di : Muara Tae dan Resak
- Paser, berlokasi di Long Ikis
- Berau, berlokasi di Talisayan dan Samsat Pasar
- Kutai Timur berlokasi di :Muara Wahau, Bengalon dan Muara Bengkal
- Bontang berlokasi di : Loktuan

b) Samsat Drive Thru yang berlokasi di Samarinda dan Balikpapan

c) Samsat Corner berlokasi di :

- Mall SCP, Samarinda
- Mall BTC, Balikpapan

d) Samsat Payment Point berlokasi :

- BPD Sungai Kunjang, Samarinda
- BPD KCP Manggar, Balikpapan
- BPD KCP Tanah Grogot, Paser
- BPD KCP Batu Kajang, Paser
- BPD KCP Long Kali, Paser
- BPD KCP Kuaru, Paser
- BPD Sepaku, Penajam
- BPD Babulu, Penajam



- e) Samsat Keliling (Mobil) berlokasi di :
- Samsat Keliling Samarinda
 - Samsat Keliling Balikpapan
 - Samsat Keliling Penajam
 - Samsat Jelajah Kutai Kartanegara
 - Samsat Jelajah Kutai Barat
 - Samsat Jelajah Kutai Timur
 - Samsat Speed Boad Kutai Barat
- f) Samsat Delivery yang akan dilaksanakan di seluruh UPTD
- POS
- g) Samsat Desa berlokasi di :
- Kutai Kartanegara
 - Kutai Timur
- h) E Samsat
- Bankaltim
 - Bank Mandiri
 - Bank BRI
 - Bank BNI
 - Indomaret
 - Pegadaian
- i) SAMSAT bersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008
- Balikpapan
 - Samarinda
 - Kutai Kartanegara
 - Paser
 - Kutai Barat



2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Menjelaskan isu-isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk itu perlu diantisipasi dengan menyikapi beberapa isu-isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Provinsi Kaltim, Satlantas (Kepolisian) untuk membuka layanan 5 tahunan.
2. Belum semua Samsat Pembantu dapat melaksanakan layanan pembayaran 5 tahunan, sehingga wajib pajak dalam menyelesaikan Pajak 5 tahunan perlu waktu dan biaya yang cukup besar untuk menuju Samsat Penuh.
3. Untuk daerah tertentu seperti perbatasan dalam memberikan layanan (samsat pembantu) masih sering mengalami kendala yang menyangkut jaringan yang masih kadang-kadang putus (Gangguan jaringan / blank spot).
4. Dengan selalu berkembangnya teknologi informasi khususnya IT kesamsatan, menyebabkan perlunya selalu diadakan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk memudahkan birokrasi dan layanan kepada wajib pajak.
5. Pemerintah pusat belum melaksanakan revisi UU no. 28 th 2009, sesuai amanat putusan MK no. 15 / ppu-XV/2017 sehingga pemungutan pajak alat berat sudah tidak dapat dilaksanakan sejak bulan oktober 2020.



6. Pemerintah mencanangkan penyelamatan lingkungan dengan mendorong masyarakat menggunakan mobil listrik berbasis battery namun belum didukung dg NJKB sebagai dasar perhitungan PKB dan BBNKB.
7. Pandemi covid 19 berimbas pada perlemahan ekonomi global dan ekonomi nasional, dan menghambat investasi serta terhentinya sektor-sektor usaha yang berdampak pada turunnya pendapatan daerah dari semua sektor.
8. Konsumsi rumah tangga / daya beli masyarakat sebagai penopang ekonomi mengalami kontraksi sehingga berpengaruh pada penjualan / pembelian kendaraan bermotor.
9. Terdapat sumber - sumber pendapatan baru pada Perangkat Daerah namun belum didukung dengan sarana prasarana serta regulasinya.
10. Terdapat potensi dana bagi hasil yg belum masuk dalam struktur pendapatan daerah.



2.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Rencana Kerja Bapenda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis kebutuhan, untuk program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan dokumen Renstra SKPD Tahun 2019 - 2023 dan Rancangan Awal RKPD. Tahun 2021 Bapenda mengusulkan rumusan program dan kegiatan dalam rangka memudahkan pengukuran kinerja serta mendukung tema RKPD tahun 2021. Sedangkan mengenai besaran anggaran yang berbeda, hal ini didasarkan atas adanya kemampuan keuangan daerah yang dalam hal ini APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.



REVIEW RENCANA KERJA BAPENDA PROVINSI KALTIM TAHUN 2021 TERHADAP RKPd PROVINSI KALTIM TAHUN 2021

Kode	RENCANA KERJA BAPENDA PROVINSI KALTIM TAHUN 2021					RKPd PROVINSI KALTIM TAHUN 2021				
	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan			Pagu Dana	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan			Pagu Dana
		Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 0 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan									
4 0 0 4 1	Badan Pendapatan Daerah				55.300.000.000	Badan Pendapatan Daerah				55.300.000.000
4 0 0 4 1 01	Badan Pendapatan Daerah Provinsi				28.000.000.000	Badan Pendapatan Daerah Provinsi				28.000.000.000
4 04 01 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	5.900.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	5.900.000.000
4 04 01 01 07 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	12	Bulan	5.900.000.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	12	Bulan	5.900.000.000
4 04 01 01 08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	Unit	4.600.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	Unit	4.600.000.000
4 04 01 01 08 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	8	Jenis	2.600.000.000	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	8	Jenis	2.600.000.000



4	04	01	01	08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11	Jenis	2.000.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11	Jenis	2.000.000.000
4	04	01	01	09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	68	%	2.500.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	68	%	2.500.000.000
4	04	01	01	09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	45	Kegiatan	2.000.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	45	Kegiatan	2.000.000.000
4	04	01	01	09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	20	PNS	500.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	20	PNS	500.000.000
							Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	325	Stel			Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	325	Stel	
4	04	01	01	10		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70	Nilai AKIP	900.000.000	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70	Nilai AKIP	900.000.000
4	04	01	01	10	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4	Dokumen	400.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4	Dokumen	400.000.000
4	04	01	01	10	02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen / Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5	Dokumen / Laporan	500.000.000	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen / Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5	Dokumen / Laporan	500.000.000



4	04	01	01	31	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	100	%	6.500.000.000	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	100	%	6.500.000.000	
4	04	01	01	31	01	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	Jumlah realisasi tunggakan pajak	60.000.000.000	Rupiah	2.000.000.000	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	Jumlah realisasi tunggakan pajak	60.000.000.000	Rupiah	2.000.000.000
4	04	01	01	31	02	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Jumlah realisasi penerimaan PKB	848.720.000.000	Rupiah	2.500.000.000	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Jumlah realisasi penerimaan PKB	848.720.000.000	Rupiah	2.500.000.000
							Jumlah realisasi penerimaan BBNKB	907.360.000.000				Jumlah realisasi penerimaan BBNKB	907.360.000.000		
4	04	01	01	31	03	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah realisasi penerimaan PBBKB	3.175.760.000.000		2.000.000.000	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah realisasi penerimaan PBBKB	3.175.760.000.000		2.000.000.000
							Jumlah realisasi penerimaan Pajak AP	14.400.000.000	Rupiah			Jumlah realisasi penerimaan Pajak AP	14.400.000.000	Rupiah	
							Jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok	171.735.000.000				Jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok	171.735.000.000		
4	04	01	01	32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapainya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	100	%	2.500.000.000	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapainya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	100	%	2.500.000.000	
4	04	01	01	32	01	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	22.489.341.200	Rupiah	1.200.000.000	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	22.489.341.200	Rupiah	1.200.000.000



4	04	01	01	32	02	Koordinasi Penerimaan lain-lain	Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	347.869.891.338			500.000.000	Koordinasi Penerimaan lain-lain	Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	347.869.891.338			500.000.000
							Jumlah realisasi lain - lain pendapatan asli daerah yang sah	795.350.270.462	Rupiah				Jumlah realisasi lain - lain pendapatan asli daerah yang sah	795.350.270.462	Rupiah		
							Jumlah realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah	12.607.000.000					Jumlah realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah	12.607.000.000			
4	04	01	01	32	03	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak	3.062.600.000.000	Rupiah		800.000.000	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak	3.062.600.000.000	Rupiah		800.000.000
							Jumlah realisasi DAU	815.693.641.000					Jumlah realisasi DAU	815.693.641.000			
4	04	01	01	33		Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	18	Dokumen		900.000.000	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	18	Dokumen		900.000.000
							Jumlah jenis pendapatan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap mekanisme pendapatan daerah serta administrasi keuangan	3	Jenis Pendapatan		500.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pendapatan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap mekanisme pendapatan daerah serta administrasi keuangan	3	Jenis Pendapatan		500.000.000
4	04	01	01	33	02	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah regulasi yang berkaitan dengan pendapatan	5	Peraturan		400.000.000	Kajian Hukum dan Perundang-undangan	Jumlah regulasi yang berkaitan dengan pendapatan	5	Peraturan		400.000.000



4	04	01	01	35	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek/Sumber Pendapatan Baru	2	Obyek	4.200.000.000	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek/Sumber Pendapatan Baru	2	Obyek	4.200.000.000	
4	04	01	01	35	01	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi sumber Pendapatan Baru	6	SPB	1.800.000.000	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi sumber Pendapatan Baru	6	SPB	1.800.000.000
4	04	01	01	35	02	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Jumlah Kajian analisis pengembangan pelayanan pendapatan	2	Kajian	2.400.000.000	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Jumlah Kajian analisis pengembangan pelayanan pendapatan	2	Kajian	2.400.000.000
4	0	0	02			UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda			4.300.000.000					4.300.000.000	
4	04	01	01	07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	2.800.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	2.800.000.000	
4	04	01	01	07	01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	2.800.000.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	2.800.000.000
4	04	01	01	08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	1.000.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	1.000.000.000	
4	04	01	01	08	01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	13	Jenis	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	13	Jenis	200.000.000



4	04	01	01	08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	800.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	800.000.000
4	04	01	01	09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	175.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	175.000.000
4	04	01	01	09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5	Kegiatan	85.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5	Kegiatan	85.000.000
4	04	01	01	09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
							Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	131	Stel	90.000.000		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	131	Stel	90.000.000
4	04	01	01	34		Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Samarinda	100	%	325.000.000	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Samarinda	100	%	325.000.000
4	04	01	01	34	01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	5.000.000.000	Rupiah	150.000.000	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	5.000.000.000	Rupiah	150.000.000
4	04	01	01	34	02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	420.000.000.000	Rupiah	175.000.000	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	420.000.000.000	Rupiah	175.000.000



4	0	0	03	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara					4.100.000.000				4.100.000.000		
4	04	01	01	07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	2.500.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	2.500.000.000	
4	04	01	01	07	01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	12	Bulan	2.500.000.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	12	Bulan	2.500.000.000
4	04	01	01	08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	21	Jenis	700.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan		Unit	700.000.000	
4	04	01	01	08	01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8	Jenis	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	21	Jenis	200.000.000
4	04	01	01	08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	500.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8	Jenis	500.000.000
4	04	01	01	09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan	200.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	200.000.000	
4	04	01	01	09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah			100.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan	100.000.000	



4	04	01	01	09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	119	Stel	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	119	Stel	100.000.000
4	04	01	01	34		Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kukar	100	%	700.000.000	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kukar	100	%	700.000.000
4	04	01	01	34	01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Kartanegara	2.000.000.000	Rupiah	500.000.000	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Kartanegara	2.000.000.000	Rupiah	500.000.000
4	04	01	01	34	02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Kartanegara	221.000.000.000	Rupiah	200.000.000	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Kartanegara	221.000.000.000	Rupiah	200.000.000
4	04	01	01	04		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur				2.700.000.000					2.700.000.000
4	04	01	01	07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	1.200.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	1.200.000.000
4	04	01	01	07	01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.200.000.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.200.000.000



4	04	01	01	08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	690.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	690.000.000	
4	04	01	01	08	01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	12	Jenis	370.000.000	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	12	Jenis	370.000.000
4	04	01	01	08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis perlengkapan Kantor yang terpelihara	8	Jenis	320.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis perlengkapan Kantor yang terpelihara	8	Jenis	320.000.000
4	04	01	01	09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	240.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	240.000.000	
4	04	01	01	09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5	Kegiatan	200.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5	Kegiatan	200.000.000
4	04	01	01	09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	44	Stel	40.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	44	Stel	40.000.000
4	04	01	01	34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kutim	100	%	570.000.000	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kutim	100	%	570.000.000	



4	04	01	01	34	01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Timur	4.000.000.000	Rupiah	240.000.000	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Timur	4.000.000.000	Rupiah	240.000.000
4	04	01	01	34	02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Timur	107.000.000.000	Rupiah	330.000.000	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Timur	107.000.000.000	Rupiah	330.000.000
4	0	0	05			UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat				2.400.000.000					2.400.000.000
4	04	01	01	07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	1.500.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	1.500.000.000
4	04	01	01	07	01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.500.000.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.500.000.000
4	04	01	01	08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	350.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	350.000.000
4	04	01	01	08	01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	100.000.000
4	04	01	01	08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	250.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	250.000.000



4	04	01	01	09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	250.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	250.000.000	
4	04	01	01	09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5	Kegiatan	200.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5	Kegiatan	200.000.000
4	04	01	01	09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	56	Stel	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	56	Stel	50.000.000
4	04	01	01	34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kubar	100	%	300.000.000	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kubar	100	%	300.000.000	
4	04	01	01	34	01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Barat	750.000.000	Rupiah	200.000.000	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Barat	750.000.000	Rupiah	200.000.000
4	04	01	01	34	02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Barat	47.500.000.000	Rupiah	100.000.000	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Barat	47.500.000.000	Rupiah	100.000.000



4	0	0	06	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan			4.000.000.000				4.000.000.000				
4	04	01	01	07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	2.479.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	2.479.000.000	
4	04	01	01	07	01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	2.479.000.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	2.479.000.000
4	04	01	01	08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	635.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	635.000.000	
4	04	01	01	08	01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	13	Jenis	90.000.000	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	13	Jenis	90.000.000
4	04	01	01	08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11	Jenis	545.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11	Jenis	545.000.000
4	04	01	01	09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	336.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	336.000.000	
4	04	01	01	09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan	265.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan	265.000.000



4	04	01	01	09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				71.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				71.000.000	
							Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	93	Stel							
4	04	01	01	34		Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Balikpapan	100	%	550.000.000	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Balikpapan	100	%	550.000.000	
4	04	01	01	34	01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan	5.000.000.000	Rupiah	260.000.000	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan	5.000.000.000	Rupiah	260.000.000	
4	04	01	01	34	02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan	450.000.000.000	Rupiah	290.000.000	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan	450.000.000.000	Rupiah	290.000.000	
4	0	0	07			UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang				2.100.000.000					2.100.000.000	
4	04	01	01	07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	1.194.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	1.194.000.000	
4	04	01	01	07	01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.194.000.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.194.000.000	



4	04	01	01	08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	310.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	310.000.000	
4	04	01	01	08	01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	11.000.000	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	11.000.000
4	04	01	01	08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	299.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	299.000.000
4	04	01	01	09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	276.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	276.000.000	
4	04	01	01	09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan	243.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan	243.000.000
4	04	01	01	09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			33.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				33.000.000	
						Jumlah Pengadaan Pakaian dinas		44	Stel		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas		44	Stel	
4	04	01	01	34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Bontang	100	%	320.000.000	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Bontang	100	%	320.000.000	



4	04	01	01	34	01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	4.000.000.000	Rupiah	170.000.000	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	4.000.000.000	Rupiah	170.000.000
4	04	01	01	34	02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	7.000.000.000	Rupiah	150.000.000	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	7.000.000.000	Rupiah	150.000.000
4	0	0	08			UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara				2.300.000.000					2.300.000.000
4	04	01	01	07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	950.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	950.000.000
4	04	01	01	07	01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	12	Bulan	950.000.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	12	Bulan	950.000.000
4	04	01	01	08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	710.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	710.000.000
4	04	01	01	08	01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	230.000.000	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	230.000.000
4	04	01	01	08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	480.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	480.000.000



4	04	01	01	09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	257.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	257.000.000	
4	04	01	01	09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	6	Kegiatan	230.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	6	Kegiatan	230.000.000
4	04	01	01	09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			27.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				27.000.000	
4	04	01	01	34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Penajam Paser Utara	36	Stel	383.000.000	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Penajam Paser Utara	36	Stel	383.000.000	
4	04	01	01	34	01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	500.000.000	Rupiah	250.000.000	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	500.000.000	Rupiah	250.000.000
4	04	01	01	34	02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	40.000.000.000	Rupiah	133.000.000	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	40.000.000.000	Rupiah	133.000.000



4	0	0	09	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser			2.900.000.000			2.900.000.000					
4	04	01	01	07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	1.100.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	1.100.000.000	
4	04	01	01	07	01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.100.000.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.100.000.000
4	04	01	01	08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	870.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	870.000.000	
4	04	01	01	08	01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	450.000.000	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	450.000.000
4	04	01	01	08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	420.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	420.000.000
4	04	01	01	09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	420.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	420.000.000	
4	04	01	01	09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	12	Kegiatan	390.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	12	Kegiatan	390.000.000



4	04	01	01	08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	495.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	495.000.000	
4	04	01	01	08	01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	100.000.000
4	04	01	01	08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	395.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	395.000.000
4	04	01	01	09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	259.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	259.000.000	
4	04	01	01	09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	13	Kegiatan	230.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	13	Kegiatan	230.000.000
4	04	01	01	09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			29.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				29.000.000	
						Jumlah Pengadaan Pakaian dinas		38	Stel		Jumlah Pengadaan Pakaian dinas		38	Stel	
4	04	01	01	34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Berau	100	%	276.000.000	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Berau	100	%	276.000.000	



4	04	01	01	34	01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	1.000.000.000,00	Rupiah	107.000.000	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	1.000.000.000,00	Rupiah	107.000.000
4	04	01	01	34	02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	68.000.000.000,00	Rupiah	169.000.000	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	68.000.000.000,00	Rupiah	169.000.000



2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur serta isu-isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, penelaahan usulan program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Bapenda telah dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, secara substansi program dan kegiatan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka tugas yang dilaksanakan, dalam arti sempit peningkatan kualitas pelayanan publik.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka optimalisasi Peningkatan Penerimaan Daerah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

Asumsi Makro perekonomian nasional yang telah diusulkan dan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun 2021

INDIKATOR	2021
	RAPBN
a. Pertumbuhan Ekonomi (% <i>,yoy</i>)	4,5-5,5%
b. Inflasi (% <i>,yoy</i>)	2,0-4,0%
c. Tingkat Suku Bunga SBN 10 tahun (%)	6,67-9,56%
d. Nilai Tukar (Rp/USD)	14.900-15300
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/Barel)	40-50
f. Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	677-737
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.085-1.173

Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan trend realisasi pendapatan, perkembangan asumsi makro ekonomi,



perkembangan kebijakan dan kondisi keuangan negara, kondisi riil dan kebijakan daerah.

Kebijakan Pemerintah Pusat sangat berpengaruh terhadap perencanaan target penerimaan dari Dana Perimbangan. Pada Tahun 2021, komponen penerimaan masih didominasi dari sektor Minerba dan Migas. Proyeksi penghitungan atas Royalty Batubara dan lifting migas didasarkan oleh harga komoditi dan kurs rupiah terhadap dolar yang relatif sulit diprediksi dan berfluktuatif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu institusi yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan lain – lain, sejalan dengan tugas dan fungsi itu maka tujuan yang ditetapkan adalah :

“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan”

Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur telah mempunyai 1 (satu) sasaran yaitu :

“Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah”

Sesuai dengan sasaran tersebut maka Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan beberapa strategi antara lain :

- Optimalisasi penerimaan dengan memaksimalkan peranan UPTD, mitra kerja dan kualitas SDM yang tersedia.
- Secara berkala melakukan sosialisasi atas Perda/peraturan terbaru dan pemberian penghargaan pada masyarakat yang taat pajak sehingga menumbuhkan dukungan masyarakat.



- Pembangunan kantor dan atau pelayanan baru di UPTD yang potensial.
- Peningkatan status dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada terutama bagi UPTD baru.
- Memaksimalkan koordinasi dengan mitra kerja lain dalam hal intensifikasi/ekstensifikasi penerimaan.
- Intensifikasi sumber penerimaan yang ada (PAD).
- Menggali potensi sumber penerimaan baru bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun kebijakan yang ditempuh Bapenda Provinsi Kaltim adalah sebagai berikut :

- Merekrut tenaga outsourcing sebagai tenaga technical support pelaksanaan implementasi teknologi di setiap Samsat/UPTD.
- Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM Aparatur.
- Kerjasama dengan perbankan dan dunia usaha.
- Memaksimalkan koordinasi dengan mitra kerja lain dalam hal intensifikasi / ekstensifikasi penerimaan.
- Melakukan kajian secara holistic untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah.
- Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak
- Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah



- Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD
- Mendorong akses informasi yang lebih luas bagi daerah dalam rangka menjamin transparansi dan pertanggung jawaban data lifting yang lebih akurat sebagai dasar pembagian DBH Migas.
- Koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan penetapan penyaluran kurang bayar dengan memperhitungkan pemotongan lebih bayar DBH dapat dilakukan secara bertahap sehingga stabilitas belanja daerah dapat terjaga
- Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan penyaluran DBH Dana Reboisasi ke daerah agar dilakukan pada awal tahun sehingga tidak mempengaruhi belanja daerah khususnya belanja kegiatan Dana Reboisasi.
- Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Prov. Kaltim, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
- Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Penyesuaian Penghitungan Besaran Perolehan Air Permukaan yang akan ditetapkan setelah mendapatkan rumusan perhitungan dari tim, terkait penetapan besaran tarif air permukaan.
- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Melakukan cleansing data base kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.



3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Bapenda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, maka ditetapkan program sebanyak 9 dan kegiatan sebanyak 19 serta dengan kerangka kerjanya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

PROGRAM KEGIATAN BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III)				Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)					
Bapenda Provinsi Kalimantan Timur									
Program	Indikator Kinerja Program			Penanggung Jawab	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Penanggung Jawab
	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	Persen	SEKRETARIS	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Sub Bagian Keuangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	Unit		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	8	Jenis	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	68	Persen		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11	<i>Jenis</i>	
					Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	45	Kegiatan	Sub Bagian Umum
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	20 325	<i>PNS</i> <i>Stel</i>	
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70	Nilai Akip		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4	Dokumen	Sub Bagian Perencanaan Program



					Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen / Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5	Dokumen / Laporan	
Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	100	Persen	KABID PAJAK	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	Jumlah realisasi tunggakan pajak	60.000.000	Rupiah	Sub Bidang Pendataan, Administrasi dan Keberatan Pajak
					Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Jumlah realisasi penerimaan PKB	848.720.000.000	Rupiah	Sub Bidang PKB dan BBNKB
						Jumlah realisasi penerimaan BBNKB	907.360.000.000	Rupiah	
Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah realisasi penerimaan PBBKB	3.175.760.000.000	Rupiah	Sub Pajak Daerah Lainnya					
		Jumlah realisasi penerimaan Pajak AP	14.400.000.000		Rupiah				
		Jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok	171.735.000.000		Rupiah				
Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapainya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	100	Persen	KABID BUKAN PAJAK	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	22.489.341.200	Rupiah	Sub Bidang Retribusi Daerah
					Koordinasi Penerimaan lain-lain	Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	347.869.891.338	Rupiah	Sub Bidang Penerimaan Lain - Lain
						Jumlah realisasi lain - lain pendapatan asli daerah yang sah	795.350.270.462	Rupiah	
Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah	12.607.000.000	Rupiah	Sub Bidang bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak					
		Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak	3.062.600.000.000		Rupiah				
					Jumlah realisasi DAU	815.693.641.000	Rupiah		



Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	18	Dokumen	KABID PEP	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pendapatan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap mekanisme pendapatan daerah serta administrasi keuangan	3	Jenis Pendapatan	Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
					Kajian Hukum dan Perundang-undangan	Jumlah regulasi yang berkaitan dengan pendapatan	5	Peraturan	Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan
Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek/Sumber Pendapatan Baru	2	Obyek	KABID PPSIP	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	Jumlah realisasi sumber Pendapatan Baru	2	SPB	Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan
					Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Jumlah Kajian analisis pengembangan pelayanan pendapatan	2	Kajian	Sub Bidang Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan



Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III)				Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)					
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda									
Program	Indikator Kinerja Program			Penanggung Jawab	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Penanggung Jawab
	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	Persen	KA UPTD SAMARINDA	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Kasubag Tata Usaha
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	13	Jenis	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	Persen		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	
					Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5	Kegiatan	
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Samarinda	100	Persen		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	131	Stel	
					Jumlah Pengadaan Pakaian dinas				
				Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	5.000.000.000	Rupiah	Kasie Pembukuan dan Penagihan	
				Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	420.000.000.000	Rupiah	Kasie Pendataan dan Penetapan	



Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III)				Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)					
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara									
Program	Indikator Kinerja Program			Penanggung Jawab	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Penanggung Jawab
	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	88	Persen	KA UPTD KUKAR	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Kasubag Tata Usaha
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Unit		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	21	Jenis	
					Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8	Jenis	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50		Persen	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	
					Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	119	Stel		
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kukar	100	Persen		Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Kartanegara	2.000.000.000	Rupiah	Kasie Pembukuan dan Penagihan
						Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Kartanegara	221.000.000.000	Rupiah



Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III)				Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)					
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur									
Program	Indikator Kinerja Program			Penanggung Jawab	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Penanggung Jawab
	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	Persen	KA UPTD KUTIM	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Kasubag Tata Usaha
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	12	Jenis	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	Persen		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8	Jenis	
					Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5	Kegiatan	
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	44	Stel	
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kutim	100	Persen		Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Timur	4.000.000.000	Rupiah	
				Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Timur	107.000.000.000	Rupiah	Kasie Pendataan dan Penetapan	



Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III)				Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)						
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat										
Program	Indikator Kinerja Program			Penanggung Jawab	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Penanggung Jawab	
	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	Persen	KA UPTD KUBAR	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Kasubag Tata Usaha	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis		
					Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	Persen		Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5	Kegiatan		
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	56	Stel		
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kubar	100	Persen		Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Barat	750.000.000	Rupiah		Kasie Pembukuan dan Penagihan
					Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Barat	47.500.000.000	Rupiah		Kasie Pendataan dan Penetapan



Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III)				Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)					
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan									
Program	Indikator Kinerja Program			Penanggung Jawab	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Penanggung Jawab
	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	Persen	KA UPTD BALIKPAPAN	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Kasubag Tata Usaha
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	13	Jenis	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	Persen		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11	Jenis	
					Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan	
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Balikpapan	100	Persen		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	93	Stel	
					Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan	5.000.000.000	Rupiah	Kasie Pembukuan dan Penagihan
					Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan	450.000.000.000	Rupiah	Kasie Pendataan dan Penetapan



Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III)				Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)					
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang									
Program	Indikator Kinerja Program			Penanggung Jawab	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Penanggung Jawab
	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	Persen	KA UPTD BONTANG	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Kasubag Tata Usaha
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	
					Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	Persen		Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan	
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek			
						Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	44	Stel	
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Bontang	100	Persen		Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	4.000.000.000	Rupiah	
				Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	7.000.000.000	Rupiah	Kasie Pendataan dan Penetapan	



Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III)				Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)						
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara										
Program	Indikator Kinerja Program			Penanggung Jawab	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Penanggung Jawab	
	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	Persen	KA UPTD PPU	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Kasubag Tata Usaha	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	Persen		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis		
					Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	6	Kegiatan		
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Penajam Paser Utara	100	Persen		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	36	Stel		
					Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	500.000.000	Rupiah		Kasie Pembukuan dan Penagihan
					Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	40.000.000.000	Rupiah		Kasie Pendataan dan Penetapan



Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III)				Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)						
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser										
Program	Indikator Kinerja Program			Penanggung Jawab	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Penanggung Jawab	
	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	Persen	KA UPTD PASER	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Kasubag Tata Usaha	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	Persen		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis		
					Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	12	Kegiatan		
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	39	Stel		
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Paser	100	Persen		Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser	1.000.000.000	Rupiah		Kasie Pembukuan dan Penagihan
					Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser	70.000.000.000	Rupiah		Kasie Pendataan dan Penetapan



Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III)				Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)						
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau										
Program	Indikator Kinerja Program			Penanggung Jawab	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Penanggung Jawab	
	Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	Persen	KA UPTD BERAU	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Kasubag Tata Usaha	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	Persen		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis		
					Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	13	Kegiatan		
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Berau	100	Persen		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	38	Stel		
					Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	1.000.000.000,00	Rupiah		Kasie Pembukuan dan Penagihan
					Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	68.000.000.000,00	Rupiah		Kasie Pendataan dan Penetapan



Seiring dengan telah diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menyesuainya yaitu dari semula terdapat 9 Program dan 19 Kegiatan menjadi 3 Program dan 6 Kegiatan serta 48 Sub Kegiatan yang mana terjadi perubahan penanggungjawab yang tadinya Program diemban oleh Pejabat Esselon III sekarang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ini Program diemban oleh Pejabat Esselon II, Kegiatan yang tadinya diemban oleh Pejabat Esselon IV sekarang diemban oleh Pejabat Esselon III, sedangkan Pejabat Esselon IV sekarang bertanggungjawab kepada Sub Kegiatan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

PEMETAAN PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 TERHADAP PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

SEMULA		MENJADI		
Program (Esselon III)	Kegiatan (Esselon IV)	Program (Esselon II)	Kegiatan (Esselon III)	Sub Kegiatan (Esselon IV)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah



	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Administrasi Keuangan	
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan			Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Koordinasi Pajak Daerah				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya		Administrasi Umum	
Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Koordinasi Penerimaan lain-lain			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	Kajian Hukum dan Perundang-undangan			Penyediaan Alat Tulis Kantor
Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah				Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan
	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak			Penyediaan Makanan dan Minuman
	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
				Pengadaan Mebeleur
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
				Pendidikan dan Pelatihan Formal
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah		
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
				Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
			Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	
				Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
				Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



				Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
				Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
				Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
				Pemeriksaan Pajak Daerah
				Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Mengacu kepada Perda No. 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi kalimantan timur, pasal 6 Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang susunan, tugas, fungsi, dan tatakerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang Pajak Daerah, Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pada Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 10,601 Trilyun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5,896 Trilyun dan Lain – lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp. 12,727 Milyar serta Dana Perimbangan sebesar Rp. 4,961 Trilyun. Untuk itu dalam rangka pencapaian target proyeksi tersebut diperlukan pendanaan yang memadai.

Dengan semakin berkembangnya teknologi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk melakukan inovasi pelayanan, dimana inovasi pelayanan yang prima memerlukan pembiayaan yang tinggi, didalam rencana kerja tahun 2021 dititik beratkan kepada kemudahan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar Pajak ataupun Retribusi dalam rangka optimalisasi pendapatan.



Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebesar Rp. 236.646.845.000,- yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 181.343.845.000,-
- Belanja Langsung : Rp. 55.300.000.000,-

Yang mana dari besaran usulan belanja tersebut meliputi Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dan 9 (sembilan) UPTB yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan besaran pagu dana untuk masing – masing UPTB sesuai dengan kebutuhan dimasing – masing UPTB. Adapun besarnya adalah sebagai berikut :

- Bapenda Provinsi yang terdiri dari ;
 - BTL : Rp 181.343.845.000,-
 - Belanja Langsung : Rp 28.000.000.000,-
- UPTD Samarinda : Rp 4.300.000.000,-
- UPTD Kutai Kartanegara : Rp 4.100.000.000,-
- UPTD Kutai Timur : Rp 2.700.000.000,-
- UPTD Kutai Barat : Rp 2.400.000.000,-
- UPTD Balikpapan : Rp 4.000.000.000,-
- UPTD Bontang : Rp 2.100.000.000,-
- UPTD Penajam : Rp 2.300.000.000,-
- UPTD Paser : Rp 2.900.000.000,-
- UPTD Berau : Rp 2.500.000.000,-

Dari pagu Anggaran yang sudah ditetapkan tersebut juga telah dirincikan sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan baik untuk yang sifatnya rutin aupun pengembangan. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini:



KERANGKA KERJA DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) (Eselon II)					Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III)					Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)									
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab	Program	Indikator Kinerja Program			Penanggung Jawab	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan			Penanggung Jawab				
		Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan			Uraian	Target	Satuan					
1.	Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pendanaan Pembangunan Daerah setiap tahunnya	3,84	Person	KEPALA BADAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	Person	SEKRETARIS	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Sub Bagian Keuangan dan Aset				
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	Unit		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	8	Jenis					
											Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11	Jenis					
											Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	45	Kegiatan					
											Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	68	Person	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	20 325	PNS Stel	Sub Bagian Umum



						Program Penyusunan Dokumen Perencanaan / Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70	Nilai Akip		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4	Dokumen	Sub Bagian Perencanaan Program
											Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen / Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	5	Dokumen / Laporan	
						Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	100	Persen	KABID PAJAK	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	Jumlah realisasi tunggakan pajak	60.000.000	Rupiah	Sub Bidang Pendataan, Administrasi dan Keberatan Pajak
											Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Jumlah realisasi penerimaan PKB Jumlah realisasi penerimaan BBNKB	848.720.000.000 907.360.000.000	Rupiah Rupiah	Sub Bidang PKB dan BBNKB
											Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah realisasi penerimaan PBBKB Jumlah realisasi penerimaan Pajak AP	3.175.760.000.000 14.400.000.000	Rupiah Rupiah	Sub Pajak Daerah Lainnya



							Jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok	171.735.000.000	Rupiah		
							Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	22.489.341.200	Rupiah	Sub Bidang Retribusi Daerah
							Koordinasi Penerimaan lain-lain	Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	347.869.891.338	Rupiah	Sub Bidang Penerimaan Lain - Lain
							Jumlah realisasi lain - lain pendapatan asli daerah yang sah	795.350.270.462	Rupiah		
							Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak	3.062.600.000.000	Rupiah	Sub Bidang bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
							Jumlah realisasi DAU	815.693.641.000	Rupiah		
							Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapaiannya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	100	Persen	
							Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas	18	Dokumen	KABID PEP
							Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pendapatan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap	3	Jenis Pendapatan	Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara															
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	Persen	KA UPTD KUKAR	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Kasubag Tata Usaha
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu		Unit	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	21	Jenis		
									Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8	Jenis		
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	Persen	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan		
											Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	119	Stel		
					Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kukar	100	Persen		Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan	2.000.000.000	Rupiah	Kasie Pembukuan dan Penagihan	



						Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain						PLL UPTB Kutai Kartanegara				
												Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Kartanegara	221.000.000.000	Rupiah	Kasie Pendataan dan Penetapan
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur																
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	Pers en	KA UPTD KUTIM	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Kasubag Tata Usaha	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	12	Jenis			
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	Pers en	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8	Jenis			
										Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5	Kegiatan			



										Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	44	Stel		
						Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kutim	100	Persen		Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Timur	4.000.000.000	Rupiah	Kasie Pembukuan dan Penagihan
											Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Timur	107.000.000.000	Rupiah	Kasie Pendataan dan Penetapan
UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat															
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	Persen	KA UPTD KUBAR	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Kasubag Tata Usaha
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan															
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	Persen	KA UPTD BALIKPAPAN	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Kasubag Tata Usaha
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	13	Jenis		
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	Persen	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11	Jenis		
					Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL	100	Persen	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan		
											Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek				
										Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	93	Stel			
										Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan	5.000.000.000	Rupiah	Kasie Pembukuan dan Penagihan	



UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser															
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	Persen	KA UPTD PASER	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	Kasubag Tata Usaha
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis		
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	Persen	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis		
									Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	12	Kegiatan		
											Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	39	Stel		
						Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Paser	100	Persen		Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan	1.000.000.000	Rupiah	Kasie Pembukuan dan Penagihan



											Sumber Daya Aparatur	mengikuti pelatihan/bimtek Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	38	Stel	
						Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Berau	100	Persen		Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	1.000.000.000,00	Rupiah	Kasie Pembukuan dan Penagihan
											Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	68.000.000.000,00	Rupiah	Kasie Pendataan dan Penetapan



PENDANAAN DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2021		Lokasi
					Target	Rp	
1	2	3	4	5	7		8
9							
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan				Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	56,48	%	
	Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah			Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah	3,84	%	
		4 04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan				
		4 04 01	Badan Pendapatan Daerah				55.300.000.000
		4 04 01 01	Badan Pendapatan Daerah Provinsi				28.000.000.000
		4 04 01 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	5.900.000.000
		4 04 01 01 07 01	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran</i>	<i>12</i>	<i>Bulan</i>	<i>5.900.000.000</i>
		4 04 01 01 08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	Unit	4.600.000.000
		4 04 01 01 08 01	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan</i>	<i>8</i>	<i>Jenis</i>	<i>2.600.000.000</i>
		4 04 01 01 08 02	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara</i>	<i>11</i>	<i>Jenis</i>	<i>2.000.000.000</i>



	4 04 01 01 09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	68	%	2.500.000.000
	4 04 01 01 09 01	<i>Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi</i>	45	<i>Kegiatan</i>	<i>2.000.000.000</i>
	4 04 01 01 09 02	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<i>Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek</i>	20	<i>PNS</i>	<i>500.000.000</i>
			<i>Jumlah Pengadaan Pakaian dinas</i>	325	<i>Stel</i>	
	4 04 01 01 10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	70	Nilai AKIP	900.000.000
	4 04 01 01 10 01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran</i>	4	<i>Dokumen</i>	<i>400.000.000</i>
	4 04 01 01 10 02	<i>Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</i>	<i>Jumlah Dokumen / Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</i>	5	<i>Dokumen / Laporan</i>	<i>500.000.000</i>
	4 04 01 01 31	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya target penerimaan pajak daerah	100	%	6.500.000.000
	4 04 01 01 31 01	<i>Pendataan, administrasi dan keberatan pajak</i>	<i>Jumlah realisasi tunggakan pajak</i>	<i>60.000.000.000</i>	<i>Rupiah</i>	<i>2.000.000.000</i>
	4 04 01 01 31 02	<i>Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB</i>	<i>Jumlah realisasi penerimaan PKB</i>	<i>848.720.000.000</i>	<i>Rupiah</i>	<i>2.500.000.000</i>
			<i>Jumlah realisasi penerimaan BBNKB</i>	<i>907.360.000.000</i>		
	4 04 01 01 31 03	<i>Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya</i>	<i>Jumlah realisasi penerimaan PBBKB</i>	<i>3.175.760.000.000</i>		<i>2.000.000.000</i>
			<i>Jumlah realisasi penerimaan Pajak AP</i>	<i>14.400.000.000</i>	<i>Rupiah</i>	
			<i>Jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok</i>	<i>171.735.000.000</i>		



		4 04 01 01 32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapainya target penerimaan Bukan Pajak Daerah	100	%	2.500.000.000	
		4 04 01 01 32 01	<i>Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah</i>	<i>Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah</i>	<i>22.489.341.200</i>	<i>Rupiah</i>	<i>1.200.000.000</i>	
		4 04 01 01 32 02	<i>Koordinasi Penerimaan lain-lain</i>	<i>Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Jumlah realisasi lain - lain pendapatan asli daerah yang sah</i>	<i>347.869.891.338</i>		<i>500.000.000</i>	
				<i>Jumlah realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah</i>	<i>795.350.270.462</i>	<i>Rupiah</i>		
				<i>Jumlah realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah</i>	<i>12.607.000.000</i>			
		4 04 01 01 32 03	<i>Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak</i>	<i>Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak</i>	<i>3.062.600.000.000</i>	<i>Rupiah</i>	<i>800.000.000</i>	
				<i>Jumlah realisasi DAU</i>	<i>815.693.641.000</i>			
		4 04 01 01 33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Jumlah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal	18	Dokumen	900.000.000	
		4 04 01 01 33 02	<i>Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah</i>	<i>Jumlah jenis pendapatan daerah yang dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap mekanisme pendapatan daerah serta administrasi keuangan</i>	<i>3</i>	<i>Jenis Pendapat an</i>	<i>500.000.000</i>	
		4 04 01 01 33 03	<i>Kajian Hukum dan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah regulasi yang berkaitan dengan pendapatan</i>	<i>5</i>	<i>Peraturan</i>	<i>400.000.000</i>	
		4 04 01 01 35	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek/Sumber Pendapatan Baru	2	Obyek	4.200.000.000	
		4 04 01 01 35 01	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan	Jumlah realisasi sumber Pendapatan Baru	6	SPB	1.800.000.000	



			Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan					
		4 04 01 01 35 02	Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Pendapatan Daerah	Jumlah Kajian analisis pengembangan pelayanan pendapatan	2	Kajian	2.400.000.000	
		4 04 01 02	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda				4.300.000.000	
		4 04 01 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	2.800.000.000	
		4 04 01 01 07 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	12	Bulan	2.800.000.000	
		4 04 01 01 08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	3	Unit	1.000.000.000	
		4 04 01 01 08 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	13	Jenis	200.000.000	
		4 04 01 01 08 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10	Jenis	800.000.000	Samarinda
		4 04 01 01 09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	50	%	175.000.000	
		4 04 01 01 09 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	5	Kegiatan	85.000.000	
		4 04 01 01 09 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Samarinda	131	Stel	90.000.000	
		4 04 01 01 34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain		100	%	325.000.000	



		4 04 01 01 34 01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	5.000.000.000	Rupiah	150.000.000	
		4 04 01 01 34 02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	420.000.000.000	Rupiah	175.000.000	
		4 04 01 03	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara				4.100.000.000	
		4 04 01 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	2.500.000.000	Kutai Kartanegara
		4 04 01 01 07 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	2.500.000.000	
		4 04 01 01 08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu		Unit	700.000.000	
		4 04 01 01 08 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	21	Jenis	200.000.000	
		4 04 01 01 08 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8	Jenis	500.000.000	
		4 04 01 01 09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	200.000.000	
		4 04 01 01 09 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan	100.000.000	
		4 04 01 01 09 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	119	Stel	100.000.000	



		4 04 01 01 34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kukar	100	%	700.000.000	
		4 04 01 01 34 01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Kartanegara	2.000.000.000	Rupiah	500.000.000	
		4 04 01 01 34 02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Kartanegara	221.000.000.000	Rupiah	200.000.000	
		4 04 01 04	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur				2.700.000.000	
		4 04 01 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	1.200.000.000	
		4 04 01 01 07 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.200.000.000	
		4 04 01 01 08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	690.000.000	
		4 04 01 01 08 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	12	Jenis	370.000.000	Kutai Timur
		4 04 01 01 08 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	8	Jenis	320.000.000	
		4 04 01 01 09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	240.000.000	
		4 04 01 01 09 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	5	Kegiatan	200.000.000	
		4 04 01 01 09 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					



				Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	44	Stel	40.000.000	
		4 04 01 01 34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kutim	100	%	570.000.000	
		4 04 01 01 34 01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Timur	4.000.000.000	Rupiah	240.000.000	
		4 04 01 01 34 02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Timur	107.000.000.000	Rupiah	330.000.000	
		4 04 01 05	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat				2.400.000.000	
		4 04 01 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	1.500.000.000	
		4 04 01 01 07 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	12	Bulan	1.500.000.000	
		4 04 01 01 08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	3	Unit	350.000.000	
		4 04 01 01 08 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	100.000.000	
		4 04 01 01 08 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	10	Jenis	250.000.000	
		4 04 01 01 09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	50	%	250.000.000	
		4 04 01 01 09 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		5	Kegiatan	200.000.000	Kutai Barat



		4 04 01 01 09 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	56	Stel	50.000.000	
		4 04 01 01 34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Kubar	100	%	300.000.000	
		4 04 01 01 34 01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Barat	750.000.000	Rupiah	200.000.000	
		4 04 01 01 34 02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Kutai Barat	47.500.000.000	Rupiah	100.000.000	
		4 04 01 06	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan				4.000.000.000	
		4 04 01 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	2.479.000.000	
		4 04 01 01 07 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	2.479.000.000	
		4 04 01 01 08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	635.000.000	Balikpapan
		4 04 01 01 08 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	13	Jenis	90.000.000	
		4 04 01 01 08 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11	Jenis	545.000.000	
		4 04 01 01 09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	336.000.000	



	4 04 01 01 09 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan	265.000.000	
	4 04 01 01 09 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				71.000.000	
	4 04 01 01 34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	93	Stel		
	4 04 01 01 34 01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Balikpapan	100	%	550.000.000	
	4 04 01 01 34 01		Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan	5.000.000.000	Rupiah	260.000.000	
	4 04 01 01 34 02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan	450.000.000.000	Rupiah	290.000.000	
	4 04 01 07	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang				2.100.000.000	Bontang
	4 04 01 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	1.194.000.000	
	4 04 01 01 07 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.194.000.000	
	4 04 01 01 08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	310.000.000	
	4 04 01 01 08 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	11.000.000	
	4 04 01 01 08 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	299.000.000	



		4 04 01 01 09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	276.000.000	
		4 04 01 01 09 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	10	Kegiatan	243.000.000	
		4 04 01 01 09 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	44	Stel	33.000.000	
		4 04 01 01 34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Bontang	100	%	320.000.000	
		4 04 01 01 34 01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	4.000.000.000	Rupiah	170.000.000	
		4 04 01 01 34 02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang	7.000.000.000	Rupiah	150.000.000	
		4 04 01 08	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara				2.300.000.000	
		4 04 01 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	950.000.000	Penajam Paser Utara
		4 04 01 01 07 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	950.000.000	
		4 04 01 01 08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	710.000.000	
		4 04 01 01 08 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	230.000.000	



		4 04 01 01 08 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	480.000.000	
		4 04 01 01 09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	257.000.000	
		4 04 01 01 09 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	6	Kegiatan	230.000.000	
		4 04 01 01 09 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				27.000.000	
		4 04 01 01 34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	36	Stel		
		4 04 01 01 34 01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Penajam Paser Utara	100	%	383.000.000	
		4 04 01 01 34 02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	500.000.000	Rupiah	250.000.000	
				Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Penajam Paser Utara	40.000.000.000	Rupiah	133.000.000	
		4 04 01 09	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser				2.900.000.000	
		4 04 01 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	1.100.000.000	Paser
		4 04 01 01 07 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.100.000.000	
		4 04 01 01 08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	870.000.000	



		4 04 01 01 08 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	450.000.000	
		4 04 01 01 08 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	420.000.000	
		4 04 01 01 09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	420.000.000	
		4 04 01 01 09 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	12	Kegiatan	390.000.000	
		4 04 01 01 09 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				30.000.000	
		4 04 01 01 34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	39	Stel		
				Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Paser	100	%	510.000.000	
		4 04 01 01 34 01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser	1.000.000.000	Rupiah	240.000.000	
		4 04 01 01 34 02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser	70.000.000.000	Rupiah	270.000.000	
		4 04 01 10	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau				2.500.000.000	
		4 04 01 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	88	%	1.470.000.000	Berau
		4 04 01 01 07 01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.470.000.000	



		4 04 01 01 08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	495.000.000	
		4 04 01 01 08 01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor diadakan	10	Jenis	100.000.000	
		4 04 01 01 08 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	10	Jenis	395.000.000	
		4 04 01 01 09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	50	%	259.000.000	
		4 04 01 01 09 01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	13	Kegiatan	230.000.000	
		4 04 01 01 09 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				29.000.000	
				Jumlah Pengadaan Pakaian dinas	38	Stel		
		4 04 01 01 34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di UPTB Berau	100	%	276.000.000	
		4 04 01 01 34 01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Realisasi Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	1.000.000.000,00	Rupiah	107.000.000	
		4 04 01 01 34 02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah Realisasi target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau	68.000.000.000,00	Rupiah	169.000.000	



Sedangkan berdasarkan perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif yang telah dibuat, diharapkan pada tahun – tahun berikutnya dengan program yang telah ditetapkan dapat meningkat seiring dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur yang semakin berat guna mewujudkan tujuan dan sasaran serta tugas lain yang menjadi beban kerja guna menjadi Kalimantan Timur berdaulat.



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja ini mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Sedangkan penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. maka Bapenda Prov. Kaltim tetap mengacu pada RPJMD 2019 – 2023.

Kaidah-kaidah didalam perumusan rencana kerja Bapenda tahun 2021 Beberapa hal yang dapat sampaikan meliputi :

- Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- Perumusan permasalahan dan analisis isu strategis Daerah;
- Perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- Perumusan strategi dan arah kebijakan;
- Perumusan program dan kegiatan

Terkait Alokasi Belanja Langsung dalam Anggaran 2021 digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan sebagaimana terkait tupoksi Badan Pendapatan Provinsi Kaltim sesuai Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pergub Nomor 77 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.

Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam



rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang memuat penjelasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan disusun berpedoman kepada Renstra Bapenda dan RKPd.

Demikian diharapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun menjadi penunjang untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan RKPd Kalimantan Timur tahun 2021 serta berguna dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Samarinda, 12 Juli 2020

KEPALA BADAN,

Dra. Hj. ISMIATI, M.Si
NIP. 19650914 199012 2 001

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 050.4 / K. / Penda-V / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2021
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusunan agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu di bentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021;
- b. Memberikan arahan dan dan petunjuk kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021;
- c. Melakukan telahaan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
- d. Merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021;
- e. Mengoreksi hasil pekerjaan tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021;
- f. Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Melaksanakan koordinasi internal tim penyusun guna penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021;
- h. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021;
- i. Melakukan analisis terhadap pencapaian kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya (Tahun 2020);
- j. Melakukan telahaan terhadap isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bada Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- k. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021;
- l. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal Januari 2021

KEPALA

Dra. Hj. Ismiati, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650914 199012 2 001

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. Budi Hartono	Sekretaris	
2	Hj. Elfina	Kabid PEP	
3	Hj. Ida Nuraini	Kasubbag. Penyusunan Program	
4	Hj. Lia Fitri Muslim	Kasubbid. Kajian Hukum & Per UU	

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 050.4 / K. / Penda-V /
2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Anggota : 1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
3. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.
4. Biro Ortal Setda Provinsi Kalimantan Timur.
5. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim.
6. Seluruh Kepala Bidang Bapenda Prov. Kaltim
7. Seluruh Kepala UPTD PPRD Bapenda Prov. Kaltim
8. Seluruh Kasubbid dan Kasubbag Bapenda Prov. Kaltim

Kelompok Kerja : 1. Staf Sub Bagian Sekretariat
2. Staf Bidang Perencanaan Pengembangan Sistem
Informasi Pendapatan
3. Staf Bidang Pajak Daerah
4. Staf Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah
5. Staf Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal Januari 2021

KEPALA

Dra. Hj. Ismiati, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650914 199012 2 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 050.4 / K. / Penda-V /
2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim
Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim
Wakil Ketua : Kabid Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi
Pendapatan
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Anggota : 1. Seluruh Kepala Bidang Bapenda Prov. Kaltim.
2. Seluruh Kepala UPTD PPRD Bapenda Prov. Kaltim.
3. Seluruh Kasubbid dan Kasubbag. Bapenda Prov. Kaltim.
Kelompok Kerja : 1. Bidang PPSIP :
Jerry Pahlevi Mahakam, SE, M.Si
2. Bidang Pajak Daerah :
Dewi Sartika, A.Md
3. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah :
Hj. Juraidah Diany, S.Hut
4. Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan :
Aidi Ridhalie
Kesekretariatan : 1. Indra Wahyudi, S.Hut
2. Belly, SH
3. Nanda Nadiera Utami Puteri, SE
4. Ezpan Supni, A.Md
5. Purwanto
6. Agus Tanu Miharja, SE

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal Januari 2021

KEPALA

Dra. Hj. Ismiati, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650914 199012 2 001

